

# **Eksistensi Agama Sebagai Pemersatu Ruang Publik**

Yasintus Debara Sera (21.75.7194)

## **Pendahuluan**

Indonesia salah satu negara yang kaya dalam berbagai hal, baik tentang kekayaan nusantara, adat dan budaya juga kaya akan toleransi dan kehidupan agama di tengah masyarakatnya. Bersumber dari kekayaan tersebut, dunia semakin mengenal Indonesia dengan keanekaragamannya. Agama adalah salah satu yang disoroti oleh dunia. Negara Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan juga dunia, tetapi ada juga agama-agama asli/tradisional yang dimiliki sebagai warisan dari para leluhur yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Agama membawa banyak perubahan yang makin terarah bagi manusia dalam kehidupan bersama. Agama dan keyakinan saat ini bukanlah hal privat bagi masyarakat luas, tetapi juga ada beberapa kelompok yang masih menganggap agama sebagai hal privat yang tidak harus menjadi konsumsi public. Dalam beberapa diskursus, agama bukan lagi hal yang harus disembunyikan karena segala aktivitas keagamaan sudah menjadi sah dilaksanakan dihadapan public dengan memperhatikan kepentingan bersama masyarakat.

Dalam berbagai pandangan tentang agama dan privatisime agama, Gereja Katolik tidak sependapat bahwa agama harus diprivasikan, hal ini karena pandangan tersebut dinilai tidak mencerminkan kekhasan ajaran Yesus bahwa keselamatan akan Allah harus diwartakan secara terbuka kepada siapa saja tanpa disembunyikan atau diprivasikan. Habermas dalam artikel yang dikutip ini menyampaikan berbagai pandangannya terhadap masyarakat religius dan juga masyarakat sekular dalam relasi mereka di ruang public. Keduanya harus bisa membangun relasi dan adaptasi dalam menghidupi doktrin agama dan juga menghargai buah atau pola pikir dari masyarakat sekuler.

## **Pandangan Agama di ruang public**

Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “a” yang berarti “tidak” dan “gama” yang berarti “kacau”, sehingga agama berarti “tidak kacau”. Arti ini dapat dipahami karena agama memang bertujuan agar penganutnya memiliki pandangan hidup dan memiliki jalan hidup yang lurus, teratur, dan tidak kacau<sup>1</sup>. Agama dipahami sebagai pandangan utama yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Agama menjadi sumber dasar dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan. Agama juga turut dilibatkan dalam membantu menyelesaikan persoalan di ranah public yang memang diperlukan. Dalam beberapa tulisan berkaitan dengan agama dalam pandangan public, agama turut mengambil peran penting sesuai dengan aturan dan juga kebutuhannya terhadap penyelesaian masalah yang sedang terjadi di ruang public. Ada beberapa paradigma yang menjelaskan peran agama, salah satunya yang tertuang dalam artikel berkaitan dengan pandangan agama di ruang public. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Richard Rott. Ia mengemukakan bahwa agama harus ditempatkan di ruang privat<sup>2</sup>. Pandangan ini sudah tak banyak digunakan atau dianut. Dalam ajaran Gereja, pandangan

---

<sup>1</sup> Hanifa Maulidia, *Agama di Ruang Publik : Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Furshet, Casanova, dan Sherkat*, 2018, hal. 2

<sup>2</sup> Otto Gusti, “Pandangan Jürgen Habermas tentang Agama dan Ruang Publik”, hal. 2

seperti ini justru bertentangan dengan karakter pewartaan Yesus yang lebih mengarah kepada pewartaan terbuka kepada siapa saja. Jose Casanova juga turut berbicara tentang “deprivatisasi” agama-agama.

Pandangan selanjutnya mengatakan bahwa agama-agama boleh terlibat dalam diskusi politik di ruang public tanpa ada batasan-batasan<sup>3</sup>. Pandangan ini dikemukakan oleh filsuf agama, Nicholas Wolterstorff. Dalam hal ini agama memang dapat terlibat dalam diskusi politik, tetapi tidak untuk menjadi perdebatan yang menghasilkan pemahaman lain berkaitan dengan agama-agama tersebut. Wolterstorff melanjutkan pendapatnya bahwa tuntutan bahwa perdebatan politik hanya memberi ruang bagi argumentasi-argumentasi sekuler merupakan bentuk pembatasan yang ilegal terhadap kebebasan warga religius<sup>4</sup>. Dalam praktik kehidupan nyata, pandangan kedua ini sudah sering dilakukan. Agama mulai dihubungkan dengan diskusi politik untuk menggali pemahaman berkaitan dengan ajaran agama dan pandangan ruang public terhadap agama dan ajaran agama tersebut. Pandangan ketiga tentang agama mengacu pada keterlibatan agama dalam diskursus politik, jika hanya membatasi diri pada pernyataan-pernyataan yang akhirnya dapat di mengerti oleh akal budi. Dari pandangan kedua ini, diketahui bahwa agama sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan akal budi. Akal budilah yang mengarahkan seseorang untuk menjalankan perannya sebagai masyarakat yang memiliki kebebasan religius seperti yang diajarkan.

Pandangan ketiga ini dikemukakan oleh Jhon Rawls, Robert Audi dan Jürgen Habermas<sup>5</sup>. Dalam pandangan agama yang ketiga ini, Rawls menambahkan tentang konsep liberalisme bahwa negara modern sekuler harus juga memperhatikan doktrin komprehensif yang rasional yang dimiliki oleh agama-agama dalam kedupan masyarakat secular saat ini. Rawls mengatakan bahwa : bagaimana mungkin di tengah kondisi plural, baik warga sekuler maupun orang-orang beragama sama-sama menyetujui tatanan politis, bukan saja sebagai sebuah “kejahatan yang diperlukan” (necessary evil), tetapi hendaknya masyarakat menerima atau menyetujui itu dalam batas-batas yang rasional dengan ajaran agama. Contoh nyata yang berikan dalam sebuah artikel berkaitan dengan pandangan ini adalah tentang pengakuan orang Kristen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan pandangan moral Kristiani tentang sikap dan praktik aborsi. Dalam pandangan Gereja, Gereja menolak segala bentuk tindakan aborsi tersebut, tetapi dalam pandangan politik praktik aborsi diijinkan tetapi dengan berbagai pertimbangan dan atas sepengetahuan pihak yang bertanggung jawab atas praktik tersebut, bukan praktik yang gelap. Praktik agama dalam ruang public kini semakin luas dilakukan, maka sangat tidak pantas jika manusia masih menganut paham bahwa agama harus diprivatisasi, sedangkan praktik saat ini agama justru semakin diperkenalkan dengan dasar dan doktrinnya yang diterima sebagai keberagaman dalam kehidupan bersama.

### **Ekspresi Agama Di Ruang Public dalam pandangan Habermas**

Agama banyak berbicara tentang sikap keimanan manusia terhadap Tuhan, Yang Kuasa yang diyakini sejak dalam kandungan. Agama juga membahas relasi yang nyata antara iman dan akal budi, sebab dalam kehidupan beragama kedua hal ini tak dapat dipisahkan. Agama juga dikatakan sebagai bentuk identitas yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Identitas ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengetahui dan memahami diri dan mengidentifikasi dirinya sebagai manusia yang beragama.

---

<sup>3</sup> Redemptus Gora, “ Melacak Peran Agama dalam Ruang Publik” , Jurnal Filsafat Teologi, 2019, hlm 2

<sup>4</sup> Otto Gusti, “Pandangan Jürgen Habermas ttg Agama dan Ruang Publik”, hlm. 2

<sup>5</sup> Ibid, hlm.2

Dalam artikel tentang agama dan demokrasi : Pandangan Jürgen Habermas tentang Agama dan Ruang Publik, Habermas dikatakan masih berpegang teguh pada teori klasiknya tentang sekularisasi dalam bukunya yang berjudul *Theorie des kommunikativen Handelns*. Modernitas yang dipahami adalah sebagai produk proses rasionalisasi system social yang saat ini kian bertambah seiring perkembangan zaman. Habermas banyak melahirkan buah pikiran tentang pandangan agama dan ruang public yang akhirnya dituangkan dalam berbagai artikel dan juga buku. Pandangannya berubah seiring perkembangan waktu dengan mempertimbangkan juga pandangan manusia yang semakin maju terhadap agama dan relasi agama dengan hal-hal intim dalam kehidupan manusia seperti iman dan akal budi. Dalam pemikirannya sekitar tahun 1980an, Habermas meninggalkan pandangan linearnya tentang evolusi social lalu mendorong agar rasionalitas postmetafisik lebih banyak menahan diri dan tidak masuk terlalu jauh ke ranah iman, sebab baginya filsafat tidak dapat memberikan hiburan dan pengharapan yang disediakan oleh agama-agama.<sup>6</sup>

Dalam beberapa buku yang ditulis oleh Habermas tentang Agama dalam ruang public lebih menekankan pada relasi iman dan pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dua buah pemikirannya yaitu Jilid pertama diberi anak judul (Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen)- “Konstelasi antara Iman dan Pengetahuan dalam Budaya Barat”. Jilid kedua berjudul (Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen)- “Kebebasan yang Rasional. Jejak-Jejak Diskursus tentang Iman dan Pengetahuan”. Ia berpendapat bahwa filsafat tidak dapat memberikan hiburan dan pengharapan yang biasanya disediakan agama-agama. Filsafat dipandanginya belajar banyak potensi semantic berkaitan dengan tradisi-tradisi agama, sehingga tidak dapat menggeser atau menggantikan agama ke ruang privat. Hal ini memang terbukti benar hingga saat, agama saat ini sudah sangat sulit digeser dari pandangan ruang public. Tetapi hal ini bukanlah masalah, karena manusia zaman secular ini semakin cerdas menanggapi hal-hal yang berkaitan pandangan agama dan praktiknya diruang public. Lalu pada tahun 2001 Habermas menggarisbawahi tentang kemungkinan dialog permanen antara agama dan pemikiran postmetafisik, ia memandang agama sebagai partner yang paling cocok mengatasi modernasi agama yang pincang di beberapa sisi. Dari tulisan-tulisan Habermas ini, agama semakin menunjukkan ungkapan moral yang dirumuskan dalam berbagai pandangan dan bahasa agama itu sendiri.

### **Peran agama di ruang Publik**

Kehidupan manusia semakin berkembang seiring waktu. Segala hal yang ada di dunia semakin berkembang mengikuti arus perkembangan bagaikan perlombaan untuk menuju yang terdepan dan terbaru di pandangan masyarakat luas. Perubahan akan hal-hal baru semakin mendorong manusia untuk belajar dan bertanggung jawab dengan kondisi perubahan tanpa meninggalkan aspek-aspek penting kehidupan. Agama salah satu aspek kehidupan yang turut berkembang dan sejatinya tak boleh terlepas dari doktri-doktrin yang dimiliki sebagai dasar ajaran yang mutlak

Dalam pandangan beberapa tokoh, agama memiliki peran teramat penting dalam kehidupan masyarakat di ruang public. Habermas merumuskan pandangannya yang bersifat inklusif tentang peran agama di dalam negara sekuler yang plural dan juga mengkritik tendensi marginalisasi agama ke ruang privat.<sup>7</sup> Habermas mengajukan term terjemahan (*Übersetzung*) dalam diskusi peran agama ruang public dalam negara sekuler. Dalam term ini pandangan-pandangan agama tidak boleh dibatasi, melainkan diterjemahkan agar “makna profan” tetap

---

<sup>6</sup> Otto Gusti, AGAMA DAN DEMOKRASI : Pandangan Jürgen Habermas ttg Agama dan Ruang Publik, hlm. 3-4

<sup>7</sup> Ibid, hlm.7

diselamatkan bagi warga sekuler<sup>8</sup>. Dalam praktiknya saat ini, banyak lahir paham-paham baru yang membuat pandangan terhadap agama sering di batasi, bahkan melahirkan atau memunculkan kembali paham bahwa agama tidak seharusnya di publikasikan secara terang-terangan tetapi haruslah diprivasi bahkan kegiatan agama harus dilaksanakan secara tertutup. Habermas juga melanjutkan pendapatnya bahwa keyakinan religius harus menjadi tanggung jawab bersama warga religius dan sekuler, sebagai bentuk kerja sama untuk mengurangi beban warga religius dan jugawarga sekuler tentang potensi sistematis dari agama-agama yang ada.<sup>9</sup> Dalam pandangannya ini Habermas menginginkan agar kedua kubu yaitu masyarakat religius dan sekuler dapat beradaptasi untuk mulai mengatasi tantangan-tantangan kognitif yang muncul dalam kehidupan mereka sebagai satu kesatuan masyarakat yang modern. Bagi umat beragama proses adaptasi ini dapat menciptakan kesadaran religius yang modern, terkhusus bagi umat religius yang doktrin agamanya terbuka dan menerima semua lapisan masyarakat.

Dalam pandangan lanjutan Habermas berkaitan dengan warga sekuler, Habermas mengatakan cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang post-metafisik. Cara berpikir ini lebih mengacu pada konsep-konsep yang rasional, procedural, faktual yang terkonstruksi secara kultural dan historis sebagai hasil dari perjumpaan dengan tantangan pada abad ke-20. Ia juga menilai bahwa pemikiran ini warga sekuler harus menahan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap kebenaran validitas agama, sebab jika segala sesuatu harus diharuskan dikonfirmasi kebenarannya maka relasi hidup masyarakat religius dan masyarakat sekular tidak akan berjalan baik. Pemikiran post-metafisik harus mempertahankan dan mengutamakan perbedaan antara iman dan akal budi, antara iman dan klaim validitas ilmu pengetahuan yang dikritisi di ruang publik. Pemikiran ini juga dikatakan oleh Habermas harus mengakui kebenaran doktrin iman sesungguhnya tidak dapat diakses oleh akal budi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pandangan agama, masyarakat religius dan sekuler harus melalui proses saling belajar.

Habermas juga turut mengungkapkan pandangan positifnya terhadap agama dan masyarakat sekuler. Yang pertama arti penting agama ketika berhadapan dengan fenomena patologi sosial dan juga tentang agama sebagai bagian dari esensial sejarah akal budi. Dalam kedua pandangan ini ia berpendapat bahwa keduanya sama-sama mengalami transformasi kognitif yang bermula dari mitos kemudian menjadi logos atau ilmu.

### **Penutup : Kritik relasi agama dan ruang publik**

Ruang publik merupakan arena yang harus dapat diakses semua orang, termasuk warga agama. Ruang publik menjadi arena diskursif warga negara. Ruang publik tidak dapat menjadi arena eksklusif kelompok tertentu. Sesuai definisinya ruang publik tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah forum opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung.<sup>10</sup> Untuk itu membangun relasi agama dan ruang publik harus siap dengan segala konsekuensi atau pandangan yang sekiranya akan diterima dari luar. Yang dimaksudkan Habermas dalam pandangannya terkait relasi agama dan ruang publik, bahwa masyarakat religius dan sekuler harus sama-sama terbuka dengan perbedaan pandangan keduanya dan mampu beradaptasi dengan baik, sehingga tidak memunculkan praktik perpecahan antara keduanya. Peran agama di ruang publik telah dijabarkan Habermas merujuk pada ruang publik yang informal. Ruang publik informal bukanlah Ruang publik informal

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 7

<sup>10</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 134

bukanlah institusi dan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi inklusif. Keadaan dapat diakses semua orang itu membuat ruang publik informal menjadi tidak tunggal, tetapi terdapat di mana-mana dengan jumlah orang tidak terbatas. Ruang publik informal itulah arena bagi warga agama untuk menyatakan gagasan religiusnya masing-masing.